

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEMASLAHATAN PERKEMBANGAN UMKM BANDA ACEH

Cut Dian Fitri¹; Rina Desiana²; Siti Laila Rahmatina³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Contributor Email: rina.desiana19@gmail.com

Abstract

Government Policy in the Covid-19 Pandemic Period Againsts the Benefits of MSME Development in Ie Masen Kayee Adang Village Banda Aceh enforced a system with the Enforcement of Community Activity Restrictions so as to reduce activities outside the home. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the development of MSMEs in Ie Masen Kayee Adang Village and government policies during the Covid-19 period for the benefit of MSME development in Ie Masen Kayee Adang Village. This study uses a qualitative descriptive approach by collecting data using the method of observation, documentation, and interview methods. The results of this study indicate that a number of parties related to the presence of the COVID-19 pandemic have had a major impact due to the policy of school and office holidays as well as social distancing. There has been a decline in the income of MSME actors by more than 50%.

Keywords: *Government Policy, Benefit, Covid-19, MSMEs*

A. Pendahuluan

Penyebaran virus covid-19 semakin meningkat tiap harinya, dan juga angka masyarakat kota Banda Aceh yang meninggal akibat positif covid-19 mencapai ratusan. Pada tingkat provinsi Aceh masyarakat yang terkonfirmasi positif virus covid-19 mencapai 19.143 jiwa, masyarakat yang sembuh berada di angka 14.508 jiwa dan yang meninggal pada tingkat provinsi Aceh mencapai 796 jiwa pada tahun 2021. Menyebarluasnya virus covid-19 di kota Banda Aceh membuat masyarakat panik dan saat ini pemerintah setempat berupaya meminimalisir peningkatan virus covid-19 dengan membuat kebijakan yang saat ini sedang diterapkan, seperti mengambil cuti dan bekerja dari rumah (Pemerintah Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2020).

Dengan adanya pembatasan untuk keluar rumah atau yang sekarang dikenal dengan istilah *social distancing* sangat berpengaruh bagi perekonomian domestik negara bangsa dan keberadaan UMKM. *Organization Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebut wabah ini berdampak pada krisis ekonomi yang akan melibatkan penghentian kegiatan produksi di berbagai negara, turunnya tingkat konsumsi publik, hilangnya kepercayaan konsumen, dan ambruknya perekonomian pasar saham OECD memperkirakan penurunan tingkat output di sebagian Negara. Prediksi ini mengancam perekonomian Indonesia.

Dampak covid-19 terhadap ekonomi juga dirasakan oleh UMKM, karena industri UMKM berada pada posisi yang strategis dalam perekonomian dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar. UMKM merupakan salah satu sektor bisnis yang sangat berdampak dari pandemi covid-19, tidak sedikit UMKM yang menutup sementara usahanya, dan banyak dari UMKM tersebut yang menghadapi risiko kendala arus kas (Baker & Judge, 2020).

Jumlah UMKM di Indonesia yang cukup besar membuat peluang usaha di Indonesia semakin baik (Pitaloka, Al-Umar, Hartati, & Fitria, 2020). Pandemi covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Pandemi ini berdampak besar bagi sektor UMKM sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya akibat ketidakmampuan mengangkut barang. Pandemi covid-19 juga mengharuskan banyak produsen dan pedagang skala kecil untuk menghentikan sementara aktivitasnya.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah UMKM yang banyak, yaitu sebanyak 74.810 UMKM. Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Aceh yang memiliki UMKM terbanyak dibandingkan kabupaten dan kecamatan di provinsi Aceh, yaitu sebanyak 9.591 UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2017).

Perekonomian para pelaku UMKM yang merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah, yang menjual beberapa macam kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM merasa kekurangan pembeli dan merasa rugi akibat dari dampak pandemi covid-19. Masyarakat Banda Aceh banyak yang berprofesi sebagai pedagang UMKM sehingga mereka menggantungkan kebutuhan hidup sebagai pedagang. Pada masa pandemi seperti ini terjadi penurunan pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjalankan UMKM.

Beberapa penelitian yang menganalisis dampak pandemi covid-19, salah satunya dalam sektor UMKM. Suatu penelitian yang mengkaji peran pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dari perspektif ekonomi Syariah. Sektor ekonomi (UMKM) menjadi salah satu sektor yang mengalami permasalahan di era pandemi Covid-19. Melihat permasalahan di atas, pemerintah harus mengambil langkah-langkah dalam menyikapinya (Adlan, 2021). Penelitian lainnya oleh Putra & Desiana (2021) yaitu tentang optimalisasi pemberdayaan kemaslahatan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu kebijakan BUMDes yaitu dengan adanya UMKM masyarakat desa Tajurhalang, Bogor memberikan kemaslahatan yaitu pada aspek *hifz al din*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* telah tercapai. Namun aspek *hifz al nafz* belum tercapai dan sementara *hifz al-'aql* belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu penelitian mengenai peran UMKM sebagai pondasi kemaslahatan perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi covid-19, menyatakan bahwa UMKM mampu

berperan sebagai tumpuan bagi kemaslahatan ekonomi masyarakat Indonesia di masa pandemi covid-19 dan menjadi kendala dalam pengembangan UMKM (Desiana, Fitri, Hasibuan, & Putra, 2021).

Penjelasan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia terutama saat pada pandemi covid-19. Provinsi Aceh turut juga dalam memberikan kebijakan untuk perkembangan UMKM, khususnya saat masa pandemi covid-19. Beberapa kebijakan pemerintah Aceh dalam menangani dampak pandemi covid-19 terutama pada sektor UMKM Banda Aceh telah diterapkan, maka dalam penelitian ini perlu dianalisis kembali kebijakan pemerintah di masa pandemi covid-19 terhadap kemaslahatan UMKM perkembangan UMKM Banda Aceh.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel dan jurnal untuk mengakses data dan informasi terkini terkait kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendapatkan gambaran yang jelas yang berguna untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana kebijakan pemerintah menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi kebijakan tersebut.

Sumber penelitian berupa laporan dari beberapa jurnal di tahun 2020 terkait penurunan pendapatan UMKM yang signifikan sejak awal Covid-19 masuk ke Indonesia. Selain sumber tersebut, terdapat informan dalam penelitian ini, yaitu dengan kriteria berikut: (1) Mereka yang telah menguasai atau memahami sesuatu melalui proses budidaya, sehingga sesuatu itu tidak hanya diketahui, tetapi juga dihayati; (2) Mereka yang berada dalam penelitian tergolong masih atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti; (3) Mereka yang punya waktu untuk dimintai informasi; (4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi "kemasannya" sendiri; dan (5) Mereka yang awalnya tergolong "cukup asing" akan menjadi peneliti agar lebih semangat mengabdikan sebagai guru atau narasumber.

Penelitian yang dilakukan pada salah satu gampong di Kota Banda Aceh yaitu gampong Ie Masen Kayee Adang. Adapun 3 instansi yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lokasi penelitian ini adalah (1) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan; (2) Bappeda; dan (3) Pemerintah Kota Banda Aceh.

Subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pihak-pihak yang dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti tentang penelitian ini.

diantaranya (1) Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UKM dan Perdagangan Banda Aceh; (2) Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Banda Aceh; (3) Kassubid Mutasi dan Promosi BKPSDM Banda Aceh; dan (4) Pelaku UMKM Kota Banda Aceh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Indonesia

Menurut rilis data, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi dibagi menjadi empat masalah. Pertama, terjadi penurunan penjualan karena menurunnya aktivitas masyarakat di luar konsumen. Kedua, sulitnya perputaran modal karena rendahnya tingkat penjualan. Ketiga, terdapat hambatan distribusi yang membatasi pergerakan distribusi produk di wilayah tertentu. Keempat, sulitnya sektor industri kecil mengakses bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Tabel berikut menunjukkan dampak penurunan penjualan paling dirasakan oleh para pelaku UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM diyakini lebih besar karena mereka sangat rentan dan memiliki sumber daya yang terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan pilihan untuk merombak model bisnisnya.

Tabel Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Dampak	Presentase (%)
Penurunan Penjualan	56
Kesulitan Permodalan	22
Hambatan Distribusi Produk	15
Kesulitan Bahan Baku	4

(Sumber: Kemenkopukm, 2021)

Sektor UMKM yang paling terkena dampak tarif adalah sektor makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebut koperasi yang bergerak di bidang jasa dan produksi juga paling terpuak akibat pandemi covid-19. Pelaku UMKM merasakan penjualan yang rendah, kekurangan modal, dan distribusi yang terhambat. Sedikitnya 39,9 persen pelaku UMKM memutuskan untuk mengurangi persediaan barang dagangannya selama masa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1% UMKM mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi covid-19 (Amri, 2020).

Dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan pada perekonomian usaha kecil dan menengah. Banyak usaha kecil di Indonesia yang mengalami resesi akibat melemahnya perekonomian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan

kelompok perusahaan yang menunjukkan jumlah yang besar dalam hal perkembangannya. UMKM telah terbukti tahan terhadap berbagai jenis masalah selama krisis ekonomi. Dengan demikian, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang terdiri dari banyak kelompok yang berbeda dapat dijadikan sebagai penguat.

2. Kebijakan Pemerintah Pada UMKM Indonesia

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dari berbagai arah dan menggunakan beberapa literatur untuk melindungi UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Berbagai upaya yang pemerintah Indonesia lakukan untuk mendukung perekonomian masyarakat melalui berbagai kebijakan. Dukungan dari semua pelaku usaha mikro sangat bergantung pada keberhasilan kebijakan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi menjaga perekonomian dari dampak pandemi Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

Kebangkitan kembali UMKM pasca dampak pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Misalnya pada bidang pariwisata, usaha yang menyediakan jasa perjalanan bisnis, agen perjalanan, perhotelan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, komunitas lokal, perusahaan asuransi, dan dari kerjasama dengan industri sejenis (Hadi & Supardi, 2020). Pemerintah harus menerapkan kebijakan revitalisasi UMKM dengan meningkatkan berbagai upaya promosi produk UMKM ke pasar domestik dan ekspor, dengan menerapkan kebijakan kredit dengan suku bunga rendah, dan mendorong peningkatan fasilitas pendukung UMKM dan kreativitas UMKM menjadi sangat kompetitif.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah suatu negara misalnya, saat pandemi Covid-19 yaitu paket kebijakan senilai USD725 juta untuk memberikan insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan dan properti, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak (Organisation for economic Co-Operation and Development, 2020). Pemerintah Indonesia memiliki enam skema perlindungan dan pemulihan UMKM akibat dampak pandemi covid-19, yaitu (1) pemberlakuan protokol kesehatan; (2) pemberian bantuan sosial; (3) insentif perpajakan; (4) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (5) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; dan (6) bantuan langsung tunai (Kemenkopukm, 2021).

3. Kemaslahatan

Dalam menjalankan kebijakannya, pemerintah juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat, yaitu mencapai kemaslahatan sekaligus menghindari timbulnya kemudharatan, dalam menjalankan. Kementerian sosial bertugas memastikan bahwa setiap warga negara diberi cukup makan, minum, dan pakaian untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang baik dan memastikan data mereka dikumpulkan dan digunakan dengan benar. Dalam proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara

bertahap dari pusat hingga tingkat desa. Mengembalikan kemaslahatan dalam hal memanusiakan manusia, menghormati dan mengangkat derajat manusia sebagaimana difitrahkan oleh Sang Pencipta. Semua kesejahteraan dan bantuan sosial harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup bagi anggota masyarakat yang paling rentan.

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah harus berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus berusaha memenuhi seluruh kebutuhan lain yang dimiliki masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan Syariat Islam sehingga masyarakat hidup dengan sejahtera (Noor, 2013).

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup yang sejahtera baik secara materil maupun spiritual di dunia dan akhirat dalam konteks Islam adalah *fallah*. Definisi *fallah* merupakan kemuliaan dan kemenangan dalam kehidupan. Islam memiliki kewajiban yang mendalam untuk persaudaraan dan keadilan yang mengarah pada konsep kesejahteraan (*fallah*) bagi seluruh umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini mencakup kepuasan fisik karena kedamaian dan kebahagiaan mental hanya dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual dari kepribadian manusia.

Maslahah merupakan landasan kokohnya untuk kembali ke kehidupan manusia yang sempurna. Menjalani kehidupan didunia untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat disebut juga dengan mengambil manfaat dan meninggalkan hal-hal yang merusak dalam kehidupan. Penerapan masalah dan mafsadah tidaklah murni, besarnya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktivitas yang dikerjakan. Jika masalah semakin banyak maka disebut masalah, sebaliknya jika mafsadah semakin kuat maka masuk ke dalam golongan mafsadah.

4. Analisis Dampak Pandemi Terhadap Perkembangan UMKM di Banda Aceh

Dampak wabah pandemi covid-19 telah dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang mengalami dampak perekonomian yang cukup besar. Menurut hasil survei sosial demografi dampak covid-19 pada responden yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan, sebanyak 72,39% masih bekerja di tengah pandemi covid-19 sementara sisanya dirumahkan. Setelah terjadinya covid-19, sebanyak 62,60% responden yang bekerja di sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan pendapatan. Dari 13,99% responden yang bekerja di sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki pendapatan kurang dari 1,8 juta. Sementara 29,26% memiliki pendapatan di atas 7,2 juta.

Seperti halnya pada UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang dalam hal ini menjadi bagian yang sangat berpengaruh dalam krisis ini. Masalah perekonomian merupakan persoalan utama yang terjadi di kalangan masyarakat. Mendapatkan pendapatan yang tinggi merupakan harapan dari setiap pelaku usaha yang berjualan disekitar wilayah gampong Ie Masen Kayee Adang. Ie Masen Kayee Adang merupakan gampong yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pelaku UMKM. Pada masa pandemi UMKM di daerah gampong Ie Masen Kayee adang mengalami penurunan pendapatan dan sepi pembeli. Namun, pada masa ini Banda Aceh menerapkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disebut PPKM, yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada masa sekarang.

Dari hasil survei sosial demografi dampak covid-19 yang dilakukan BPS menyatakan bahwa beberapa sektor usaha produksi mengalami penurunan pendapatan usaha ini terjadi karena penjualan hasil produksi yang sepi sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan usaha. Dari 44,67% responden laki-laki dan 38,55% responden wanita yang di survei oleh pihak BPS mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat covid-19. Hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan dari pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, terlihat jelas bahwa keadaan pelaku UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang mengalami sepi pembeli dan banyak juga yang mengalami penurunan pendapatan daripada sebelum adanya masa pandemi ini. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat pelaku UMKM pada masa pandemi ini mengalami penurunan pembeli dan tentu hal tersebut membuat mereka mengalami penurunan omset penjualan.

Dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan usaha dari pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan daya beli dari masyarakat dan pengurangan waktu operasional penjualan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penjualan para pelaku usaha. Pelaku usaha yang mencoba mengatasi pandemi virus covid-19 kemungkinan menghadapi masalah keuangan yang lebih serius daripada yang mereka alami selama resesi hebat lebih dari satu dekade lalu, dengan banyak usaha kecil tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Selama wabah covid-19, banyak usaha kecil yang menutup sementara karena konsumen tetap dirumah untuk menghindari penyebaran virus yang sangat menular.

Pelaku usaha UMKM di Gampong Ie masen juga mengatakan bahwa kurangnya bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang terjadi ditengah wabah pandemi ini. pelaku usaha UMKM merasa tidak puas dengan peran pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Adanya wabah pandemi Covid-19 ini tentu saja mempengaruhi hasil usaha yang dijalankan oleh masyarakat salah satunya

pelaku usaha Gampong Ie Masen Kayee Adang. Namun pelaku usaha di gampong Ie Masen Kayee Adang tetap bertahan selama masa pandemi ini. Mengingat bahwa ada beberapa dari mereka yang mampu memperkerjakan kerabat ataupun teman sebagai karyawan dan saling bergantung satu sama lain. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak wabah pandemi tersebut. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan semangat dari pelaku usaha UMKM yaitu dengan memberikan beberapa pelatihan yang terkait untuk mengembangkan inovasi-inovasi pada UMKM di gampong-gampong, salah satunya gampong Ie Masen Kayee Adang.

5. Analisis Kebijakan Pemerintah Banda Aceh Terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang

Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM ini adalah sebuah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dari suatu organisasi mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan nilai-nilai baru di masyarakat. Kebijakan pemerintahan diharapkan bersifat umum, tetapi tidak menghilangkan karakter lokal tertentu. Kebijakan pemerintah ini harus memberikan kesempatan untuk dimaknai sesuai dengan kondisi tertentu yang ada. Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam negara baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

a. Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan kota Banda Aceh

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku UKM di Banda Aceh adalah dengan memberikan beberapa tahap. Dinas koperasi dan UKM perdagangan kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pemberian bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.200.000 itu jumlahnya terbatas hanya untuk 425 usaha mikro dengan kriteria harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Banda Aceh, dan bantuan itu salurkan kepada pelaku usaha mikro yang tidak mendapatkan bantuan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) sebelumnya. Beliau juga mengatakan banyak data yang tidak sesuai bagi penerima BPUM, itu dikarenakan masyarakat tidak jujur dalam memberikan data, bahkan penerimanya bisa mendapat bantuan beberapa kali dengan orang yang sama. Untuk itu pemerintah melakukan cleansing data-data yang tidak sesuai dengan syarat yang diberikan. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan peralatan berupa alat-alat untuk tukang bangunan, tukang perabot, tukang las, pedagang mie, dan kelompok usaha pembuat kue yang sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan. Untuk Kota Banda Aceh diberikan pendampingan dan pembinaan secara full dalam bentuk pelatihan, workshop dalam hal pemasaran digital. Adapun pemerintah yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi RI khusus sektor pelaku usaha dan perikanan melakukan sistem pemasaran digital yang khusus dibentuk dan dididik untuk memperluas bangsa pasar dan memperbesar omset

penjualan, itu semua merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pelaku usaha mikro agar tetap bertahan dan eksis di masa pandemi covid-19.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Noor (2013) dalam bukunya Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam yang mengatakan bahwa untuk kesejahteraan masyarakat suatu daerah, pemerintah harus berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi warganya, tetapi juga harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan pelengkap lainnya. Dinas UMKM mencoba dengan arif meminimalisir kendala yang ada saat menerapkan kebijakan tersebut, dan memastikan upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syariat Islam sehingga masyarakat dapat mencapai output yang diinginkan dan hidup sejahtera.

b. Pemerintah Kota Banda Aceh

Peneliti tidak hanya mewawancarai kabid PUM akan tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Kasubbid mutasi dan promosi BKPSDM Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa: "Pemerintah kota memberikan bantuan beberapa tahap yang di umumkan pada internet maupun sosial media. Saat ini, sudah 4 kali penyaluran yaitu berbentuk alat-alat usaha, baik untuk perbengkelan, atau ibu-ibu untuk berjualan kue. Kemudian juga diberikan bantuan melalui Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) pelatihan dan juga dari dinas pariwisata juga dibantu UMKM dalam bentuk ekonomi kreatif, pelatihan CSI, kemudian bantuan dana hibah di akhir tahun 2020 yang peruntukkan untuk UMKM kota Banda Aceh Wawancara, 7 Desember 2021).

Dijelaskan oleh T. Musrizal selaku perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Kasubbid mutasi dan promosi BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai narasumber peneliti Kebijakan tersebut sudah lama disampaikan walikota bahkan dari sebelum masa pandemi ini datang. Peneliti juga menanyakan kepada narasumber terkait solusi yang pemerintah lakukan terhadap kendala data penerima umkm. Pemerintah meminta data di pusat statistik dan dinas koperasi yang lebih dulu mengambil data di lapangan, kemudian data di pajak karena juga ada pendataan penagihan BPK Kota Banda Aceh sinkronisasi tersebutlah yang akan diberikan ke UMKM. Narasumber juga menjelaskan keadaan sebelum covid-19 pemberian bantuan hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh (DISPERINDAG) saja. Tetapi setelah covid, hampir semua stakeholder dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu mengarahnya kepada bantuan UMKM. Adapun menghindari kesalahan data sasaran saat daftar, dilakukan seleksi kembali sesuai dengan data yang lengkap sesuai syarat dan itu akan ditambah menjadi kuota bantuan. Dalam menanggapi kritisi masyarakat terhadap upaya pemerintah sangat sah diterima.

Adanya tingkatan pemahaman dari masyarakat itu sendiri itu sudah sangat tepat akan tetapi berbeda. Tetapi untuk data dalam UMKM yang dilaksanakan pemerintah Kota Banda Aceh kita memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar. Untuk pendaftaran tidak adanya batasan, dikarenakan yang tidak dapat bantuan tersebut otomatis tidak melalui syarat-syarat yang diberikan. Terkadang yang terdata dan yang diberikan usaha yang sudah luan merintis usaha kecil menengahnya di Banda Aceh.

Dalam perekonomian peran pemerintah memegang peranan penting. Implementasi kebijakan fiskal adalah peran untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kajian Islam tentang kemaslahatan merupakan salah satu poin penting, tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari dari mafsadah dan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT memiliki manfaat yaitu untuk kebaikan manusia. Setiap masalah yang menyimpang dari rahmat, hikmah, maslahat, dan keadilan tidak berasal dari ketentuan Allah. Karena tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia di dunia dan akhirat. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam syariah mengandung rahmat, dan semuanya mengandung hikmah.

c. Bappeda Banda Aceh

Peneliti melakukan wawancara dengan Parma Kope selaku Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memberikan kebijakan berupa perencanaan, evaluasi, monitoring. Perencanaan Bappeda lebih kepada perencanaan secara umum, tugasnya dalam masa pemerintahan walikota sekarang bappeda bisa menyiapkan perencanaan selama 5 tahun untuk pembangunan kota (Wawancara, 1 Desember 2021).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Parmakope selaku Kepala bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam (Bappeda), dimana tugas Bappeda mengusulkan perencanaan sektoral. Bappeda yang melihat susunan dinas bisa mendukung pencapaian visi misi walikota. Narasumber juga menjelaskan bisa saja mungkin dalam usulan-usulan tersebut mereka mengusulkan bagaimana mereka membantu masyarakat khususnya pelaku bisnis UMKM. Untuk mendapat bantuan dari pemerintah banyak pelaku UMKM tidak jujur dalam memberikan data usahanya, seperti alamat di KTP tidak sesuai dengan alamat yang ditempati sekarang, sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan dari pemerintah.

Masa pandemi ini berdampak signifikan bagi para pelaku UMKM. Memberikan bantuan adalah peran pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM. Tujuan hidup ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan. Semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kemaslahatan bagi masyarakat disebut dengan kebutuhan atau hajiyyat. Memenuhi kebutuhan adalah cara ekonomi untuk mengejar tujuan agama. Semua

tindakan ekonomi akan menghasilkan keuntungan besar atau kecil, tergantung pada pelaksanaan ekonomi, yang memperhatikan lima indikator kemaslahatan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan tahap new normal demi menyelamatkan perekonomian negara. Banyaknya UMKM pada masa pandemi mengalami dampak penurunan pendapatan. Beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah adalah memberikan bantuan dana kepada para pelaku UMKM baik berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT), bantuan modal usaha, bantuan alat peralatan usaha dan pelatihan pendampingan bagi pelaku UMKM. Tujuan pemerintah memberikan bantuan dana kepada UMKM untuk memperkuat ketahanan usaha khususnya UMKM dimasa pandemi ini. Tidak hanya itu pemerintah juga memberikan perlindungan bagi UMKM untuk menjaga kesejahteraan hidup mereka agar usaha UMKM dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk menunjang perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh, pemerintah berperan langsung dalam memberikan bantuan keuangan dan pembinaan atau pendampingan yang dikelola oleh dinas sendiri kepada UMKM yang terkena covid-19 bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Penerapan tingkat hajiyyat di masa pandemi karena adanya pemberian bantuan dana kepada UMKM. Agar tercapainya prinsip *Al-Falah* atau kesejahteraan pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong lemah. Pemberian bantuan ini untuk memperkuat posisi UMKM dalam menstabilkan perekonomian. Konsep kemaslahatan untuk ummat di bidang ekonomi merupakan bentuk dari maqashid Syariah. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota Banda aceh kepada pelaku UMKM sudah tepat, hanya saja pemberian bantuannya tidak merata, dikarenakan sebagian pelaku UMKM saat mendaftar tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah pihak terkait yang dilakukan peneliti terhadap kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan perkembangan UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang Kota Banda Aceh, penulis menarik kesimpulan bahwa kehadiran covid-19 berdampak besar terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Khususnya untuk usaha kecil dan menengah di wilayah Banda Aceh, gampong Ie Masen Kayee Adang, semenjak masuknya wabah pandemi covid-19 dari segi kelangsungan usaha hampir dapat dikatakan usaha mereka mengalami perubahan yaitu:

- a. Selama masa pandemi covid-19 dampak yang dirasakan pelaku UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang mengalami kelumpuhan. Hal itu disebabkan oleh kebijakan peliburan sekolah dan perkantoran serta adanya jaga jarak bagi

- masyarakat terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM hingga lebih dari 50% dari hari-hari sebelum adanya pandemi covid-19.
- b. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Perkembangan UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang, ada tiga yaitu (1) Pemberian pelatihan dan pendampingan; (2) Pemberian modal kerja; (3) Pemberian bantuan berupa peralatan; dan (4) Peranan pemerintah kota Banda Aceh.

Kegiatan ekonomi akan menghasilkan manfaat yang signifikan setelah mencapai indikator yang terkandung dalam maqasyid Syariah Al-Shatibi. Pertama, mencapai indikator jiwa (*hifz Nafs*). Pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM menjadi lebih kompetitif. Selain itu, agar kehidupan ekonomi pelaku ekonomi UMKM mencapai kesejahteraan. Kedua, pencapaian dalam tingkat indikator harta (*hifz mal*) melalui pemberian bantuan dana fasilitas yang menunjang pengembangan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 81-104. doi:<https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3552>
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123-130. Retrieved from <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand/article/view/605>
- Baker, T., & Judge, K. (2020). How to Help Small Businesses Survive Covid-19. *SSRN Electronic Journal*. doi:<https://doi.org/10.2139/ssrn.3571460>
- Desiana, R., Fitri, C. D., Hasibuan, M. R., & Putra, A. D. (2021). Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemaslahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 4(2), 566-575. Retrieved from <http://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/EKBI/article/view/386>
- Dinas Koperasi dan UKM Aceh. (2017). *Menampilkan Informasi Data Keragaan Koperasi, UMKM, dan Produk UKM Aceh*. Banda Aceh: Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Retrieved from <https://dataukm.acehprov.go.id/index.php/ukm>
- Hadi, S., & Supardi, S. (2020). Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises After Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology*, 12(4), 4068-4076. doi:<https://doi.org/10.37896/JXAT12.04/1149>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns Journal*, 2(1), 146-153.

- Kemenkopukm. (2021, Februari 15). *Semua Sektor UMKM Terguncang Akibat Covid-19* . Retrieved from <https://kemenkopukm.go.id/read/semua-sektor-umkm-terguncang-akibat-covid-19>
- Noor, R. A. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Organisation for economic Co-Operation and Development. (2020, Februari 15). *Coronavirus (Covid-19): SME Policy Responses*. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
- Pemerintah Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh. (2020). *Buku Panduan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Retrieved from Adlan, M. A. (2021). Peran Pemerintah dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 81-104. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3552>
- Pitaloka, H., Al-Umar, A. U., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The Economic Impact of the Covid-19 Outbreak: Evidence from Indonesia. 71-76.
- Putra, A. D., & Desiana, R. (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 24-38. Retrieved from <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi/article/view/124>

